

# DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP IPM DI INDONESIA

## *IMPACT OF FISCAL DECENTRALIZATION FISCAL ON HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN INDONESIA*

Jurni Hayati<sup>1</sup> and Andhatu Achasa<sup>2,1,2</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Tidar

<sup>1</sup>[jurni.hayati@gmail.com](mailto:jurni.hayati@gmail.com)

<sup>2</sup>[dhatu\\_86@gmail.com](mailto:dhatu_86@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tipologi daerah berdasarkan desentralisasi fiskal dan IPM serta menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap IPM di Indonesia. Data yang digunakan data IPM, PAD, DBH SDA, PDRB per kapita, tingkat kemiskinan, koefisien gini, dan tingkat pengangguran di Indonesia periode 2000-2014 yang diperoleh dari BPS Provinsi DI Yogyakarta. Alat analisis menggunakan metode *scatter graph* dan GLS FEM. Hasil dari analisis metode *scatter graph* menunjukkan bahwa provinsi yang tergolong IPM tinggi dan rasio PAD tinggi adalah provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. IPM tinggi dan rasio DBH SDA tinggi adalah provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Hasil dari regresi dampak desentralisasi fiskal terhadap IPM dilihat dari sisi rasio PAD dan rasio DBH SDA menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Hasil regresi ini relatif robust karena cenderung tidak jauh berbeda setelah ditambah variabel rasio DAU.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, IPM, *Scatter graph*, GLS FEM.

### **Abstract**

*The purpose of this study was to analyze regional typology based on fiscal decentralization and HDI and analyze the impact of fiscal decentralization on HDI in Indonesia. The data used are data of IPM, PAD, DBH SDA, PDRB per capita, poverty level, gini coefficient, and unemployment rate in Indonesia period 2000-2014 obtained from BPS Provinsi DI Yogyakarta. The analysis tool use scatter graph and GLS FEM method. The results of the scatter graph analysis showed that provinces have high HDI and high PAD ratios are DKI Jakarta, Yogyakarta, North Sumatera, West Sumatera, Bali, Central Java and West Java provinces. High HDI and high DBH SDA ratios are Riau, East Kalimantan, South Sumatera and Jambi provinces. The regression result of this research show impact of fiscal decentralization on HDI in terms of PAD ratio and DBH SDA ratio showed a positive and significant influence. The regression result is relatively robust because it tends not much different after added variable DAU ratio.*

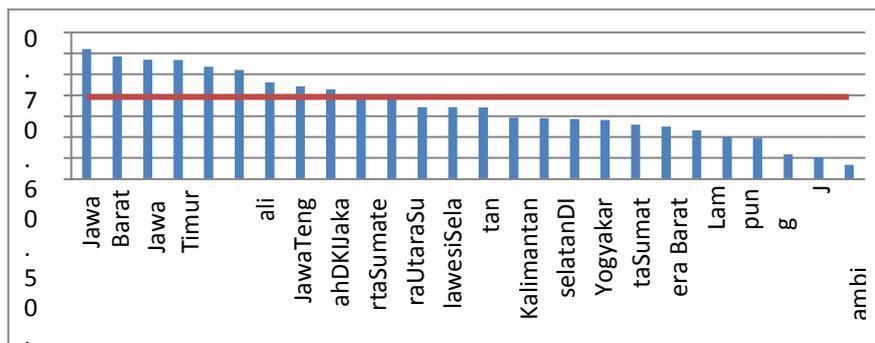
*Keywords: Fiscal Decentralization, HDI, Scatter graph, GLS FEM.*

## PENDAHULUAN

Cheema dan Rondinelli (1983), Turner dan Hulme (1997) menyatakan bahwa desentralisasi adalah transfer kewenangan, tanggungjawab, perencanaan, pengambilan keputusan, dan fungsi-fungsi pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga semi pemerintah, maupun kepada swasta. Smith (1986), Barzelay (1991), Turner dan Hulme (1997) menjelaskan bahwa desentralisasi merupakan cara mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat. Bila pemerintah dalam jangkauan masyarakat, pelayanan lebih cepat, hemat, responsif, akomodatif, dan inovatif.

Beberapa studi menunjukkan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah lebih optimal dan cenderung lebih murah serta demokratis (Campbell, Peterson, dan Brakarz, 1991 dalam Bird, 1998). Dalam penelitian ini desentralisasi fiskal diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya yang sering disebut sebagai derajat desentralisasi fiskal (DF). Dalam penelitian ini derajat desentralisasi fiskal diproksi dengan rasio PAD terhadap TPD, rasio DBH SDA terhadap TPD.

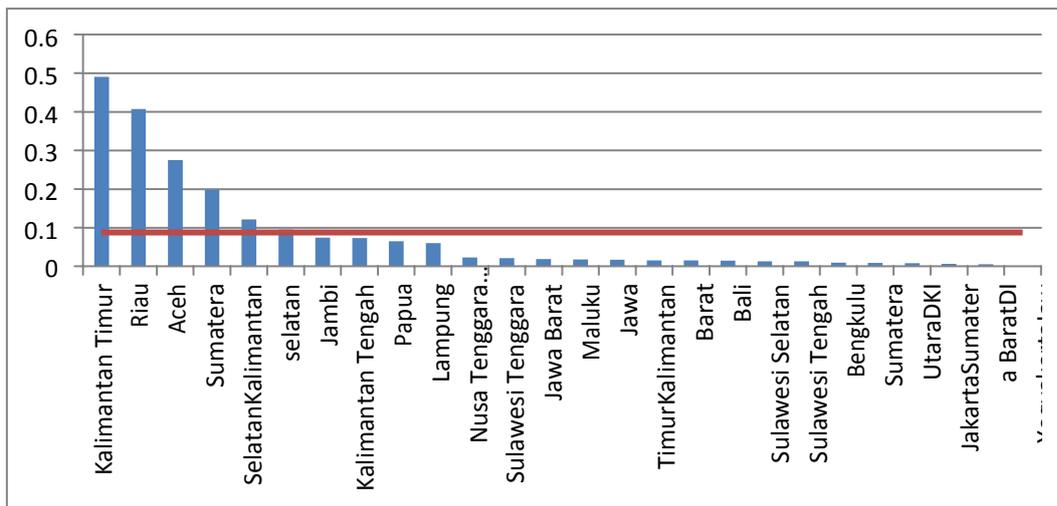
Saat ini Indonesia terdiri dari 35 provinsi, namun dalam penelitian ini ada beberapa provinsi yang digabungkan ke provinsi asal sehingga menjadi 26 provinsi. Hal ini dikarenakan mempertimbangkan kelengkapan data yang di perlukan dalam penelitian ini. Dari 26 provinsi di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang berbeda-beda. Perbedaan sumber daya tersebut dapat dilihat dari besarnya PAD dan DBH SDA. Provinsi yang memiliki PAD dan SDA yang tinggi akan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya, sedangkan provinsi yang memiliki sedikit PAD dan SDA akan sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat (Kemenkeu, 2013).



Sumber: BPS, 2016 (data diolah).

Grafik 1.1. RPAD Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2000-2014

Dari grafik 1.1.dapat di lihat bahwa RPAD di atas rata-rata nasional sebagian besar berada di seluruh provinsi pulau Jawa. Hal ini dikarenakan persentase jumlah penduduk dan industri di pulau Jawa lebih besar dari pada pulau lainnya sehingga penerimaan pajak, retribusi, dan laba perusahaan yang didapatkan akan besar pula. RPAD yang tertinggi yaitu di provinsi Jawa Barat dan yang terendah di provinsi Papua.Hal ini dikarenakan di provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk yang besar, banyak perusahaan besar, dan industri-industri kecil yang berkembang pesat, sedangkan di provinsi Papua masih sangat sedikit.Besarnya RPAD tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) masyarakat lokal.

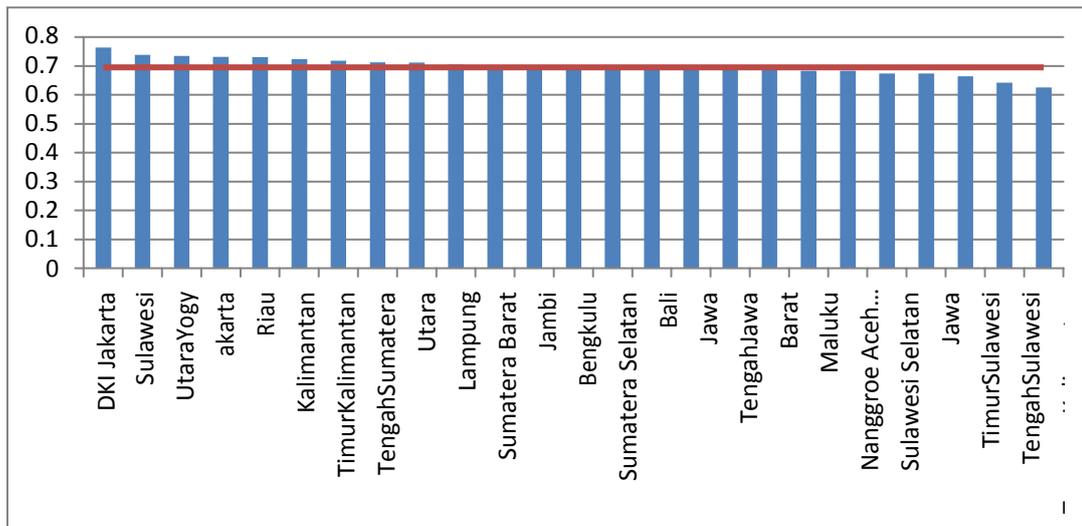


Sumber: BPS, 2016 (data diolah).

Grafik 1.2. RBHS Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2000-2014

Berdasarkan grafik 1.2. dapat dilihat bahwa ada beberapa provinsi yang memiliki RBHS yang tinggi, yaitu di provinsi Kalimantan Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Jambi. Provinsi-provinsi tersebut memiliki berbagai macam sumber daya alam, seperti; minyak bumi, gas, batu bara, mas, nikel, dan lain-lain. Banyaknya sumber daya alam yang dimiliki dapat meningkatkan RBHS yang diterima oleh pemerintah provinsi.Besarnya RBHS ini dapat digunakan untuk meningkatkan IPM masyarakat lokal.RBHS terendah yaitu di provinsi Nusa Tenggara Timur, hal ini dikarenakan sedikitnya SDA yang ada sehingga RBHS yang diterima menjadisedikit.

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Tujuan utama kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah percepatan terwujudnya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat (Bappenas, 2007).Indikator untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari IPM (UNDP, 1990). Di seluruh provinsi Indonesia rata-rata IPM berada pada level menengah dan belum ada yang mencapai IPM level tinggi (diatas 0.80%) selama masa desentralisasi.



Sumber: BPS, 2016 (data diolah).

Grafik 1.3. IPM Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2000-2014

Dari grafik 1.3. menunjukkan bahwa IPM provinsi-provinsi di Indonesia sebagian besar berada pada level menengah. Hal ini di karena IPM tidak hanya di lihat dari segi material tetapi juga dari sisi pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup. Provinsi yang memiliki IPM yang tinggi yaitu di provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Untuk provinsi lainnya berada di bawah rata-rata IPM nasional. Provinsi yang memiliki IPM terendah yaitu di provinsi Papua, hal ini disebabkan oleh kepadatan penduduk, luas wilayah, dan rendahnya APBD sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas publik yang pada akhirnya dapat mengakibatkan angka IPM menjadi rendah.

Berdasarkan data IPM provinsi-provinsi di Indonesia di atas, dapat dilihat bahwa IPM provinsi-provinsi di Indonesia rata-rata berada pada level menengah baik itu di provinsi yang tinggi RPAD maupun yang tinggi RBHS. Hal ini bertolak belakang dengan berbagai teori desentralisasi yang mengatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana tipologi daerah berdasarkan desentralisasi fiskal dan IPM serta bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap IPM di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel berbentuk *time series* dari tahun 2000-2014, dan data *cross section* yang terdiri atas 26 Propinsi di Indonesia. Data diperoleh dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

## Definisi Operasional Variabel

### 1. VariabelDependen

Indeks pembangunan manusia (IPM) adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan oleh kondisi ekonomi dan keadaan sosial masyarakat.

### 2. VariabelIndependen

Desentralisasi fiskal diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan daerahnya yang sering disebut sebagai derajat desentralisasi fiskal (DF). Dalam penelitian ini derajat desentralisasi fiskal diproksi dengan RPAD terhadap TPD, RBHS terhadap TPD.

### 3. VariabelKontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu: PDRB per kapita (PDRBPK), tingkat kemiskinan (TKMSN), dan koefisien gini (KGINI), tingkat pengangguran (TPGRN).

## Metode Estimasi Data Panel

### 1. Uji Metode Estimasi DataPanel

Sebelum menentukan metode estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka harus dilakukan beberapa pengujian. Pertama Uji Chow untuk memilih teknik dengan metode pendekatan PLS atau metode FEM. Kedua Uji Hausman untuk memilih antara metode pendekatan FEM atau metode REM.

### 2. Uji AsumsiKlasik

Dalam membentuk persamaan regresi perlu dilakukan pengujian asumsi Klasik untuk mendapatkan persamaan yang bersifat BLUE (best linear unbiased estimator). Asumsi utama yang harus dipenuhi ada tiga, yaitu; homoskedastisitas, tidak ada multikolinearitas, dan tidak ada serial outokorelasi.

### 3. UjiRobustness

Uji *robustness* dapat digunakan untuk melihat konsistensi dan menguatkan hasil penelitian. Dalam penelitian uji robustness ini dilakukan dengan cara menambahkan proksi pada variabel independen, variabel independen yang ditambah adalah rasio DAU(RDAU).

## Estimasi Model Penelitian

Model penelitian yang akan diestimasi adalah sebagai berikut:

### 1. Untuk melihat tipologi masing-masing provinsi digunakan metode *scattergraph*.

Dalam metode ini akan mengklasifikasikan provinsi berdasarkan desentralisasi fiskal dan IPM. Cara pengklasifikasinya yaitu dengan membandingkan rata-rata desentralisasi fiskal (RPAD dan RBHS) dan rata-rata IPM provinsi (i) periode 2000-2014 dengan rata-rata nasional (n). Kemudian provinsi yang diamati dibagi menjadi beberapa klasifikasi seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1. Tipologi Daerah Berdasarkan IPM dan RPAD

IPM RPAD	(IPM <sub>i</sub> <IPM <sub>n</sub> )	(IPM <sub>i</sub> >IPM <sub>n</sub> )
(rpad <sub>i</sub> >rpad <sub>n</sub> )	IPM rendah dan pad tinggi	IPM tinggi dan pad tinggi
(rpad <sub>i</sub> <rpad <sub>n</sub> )	IPM rendah dan pad rendah	IPM tinggi dan pad rendah

Tabel 2.2. Tipologi Daerah Berdasarkan IPM dan RBHS

PDRBPK RBHS	(IPM <sub>i</sub> <IPM <sub>n</sub> )	(IPM <sub>i</sub> >IPM <sub>n</sub> )
(rbhs <sub>i</sub> >rbhs <sub>n</sub> )	IPM rendah dan bhs tinggi	IPM tinggi dan bhs tinggi
(rbhs <sub>i</sub> <rbhs <sub>n</sub> )	IPM rendah dan bhs rendah	IPM tinggi dan bhs rendah

2. Untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap IPM merujuk pada penelitian Jumadi et.al (2013) dan Suri et.al(2011).

Model yang dibangun sebagai berikut:

$$ipm_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 rpad_{it} + \beta_2 rbhs_{it} + \beta_3 pdrbpk_{it} + \beta_4 tkmsn_{it} + \beta_5 kgini_{it} + \beta_6 tpgrn_{it} + \varepsilon_{it}$$

Tabel 2.3. Variabel Independen dan Hipotesis Model

Penelitian

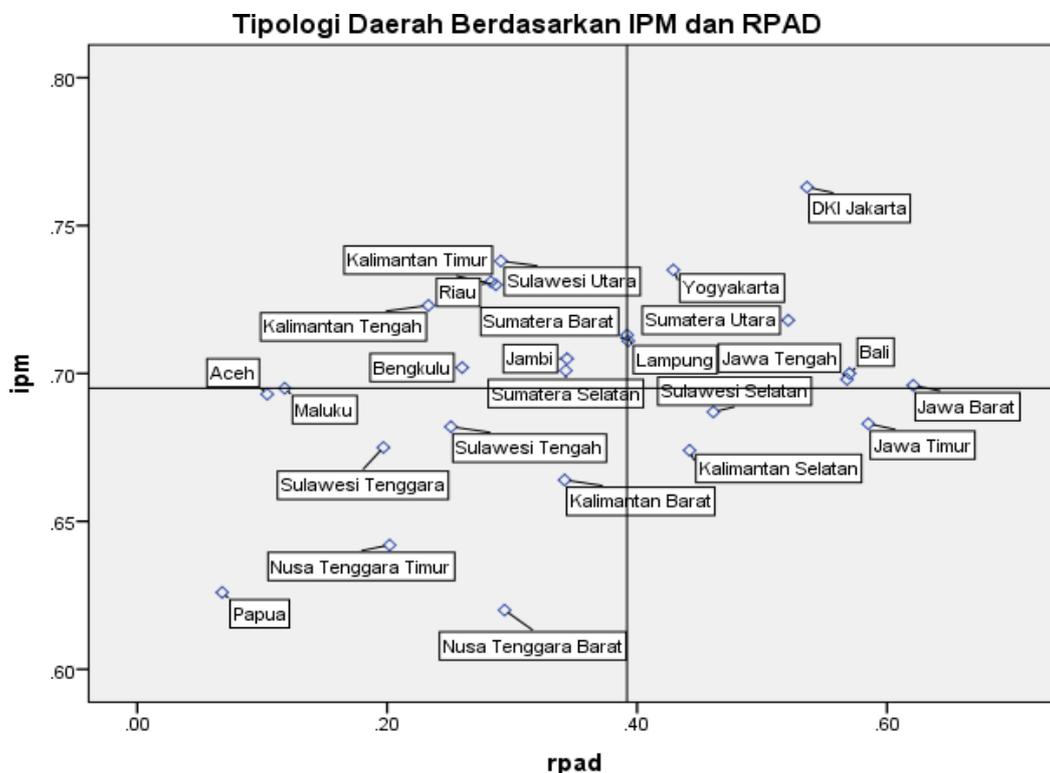
No	Variabel	Penjelasan	Hipotesis
1	rpad <sub>it</sub>	rasio PAD terhadap TPD provinsi i pada tahun t	berdasarkan teori Neoklasik, Bird dan Vaillancourt (1998), dan penelitian Jumadi <i>et.al</i> (2013), ada pengaruh positif rpad terhadap IPM.
2	rbhs <sub>it</sub>	rasio DBH SDA terhadap TPD provinsi i pada tahun t	berdasarkan teori Adam Smith, dan penelitian Jumadi <i>et.al</i> (2013), ada pengaruh positif rbhs terhadap IPM.
3	pdrbpk <sub>it</sub>	pdrbpk riil provinsi i pada tahun t	berdasarkan teori Oates (1993) dan penelitian Suri <i>et.al</i> . (2011) ada pengaruh positif PDRB per kapita terhadap IPM.
4	tkmsn <sub>it</sub>	tingkat kemiskinan provinsi i pada tahun t	berdasarkan teori Pigou (1960) dan penelitian Suri <i>et.al</i> . (2011) ada pengaruh negatif kemiskinan terhadap IPM.

5	kgini <sub>it</sub>	koefisien gini provinsi i pada tahun t	berdasarkan teori Pigou (1960) dan penelitian Suri <i>et.al.</i> (2011) ada pengaruh negatif koefisien gini terhadap IPM.
6	tpgrn <sub>it</sub>	tingkat pengangguran provinsi i pada tahun t	berdasarkan teori Neoklasik dan penelitian Parhah (2002) ada pengaruh negatif pengangguran terhadap IPM.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Tipologi Daerah

Untuk melihat keadaan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kemandirian daerahnya, seperti dari RPAD dan RBHS. Kemudian untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari IPM.

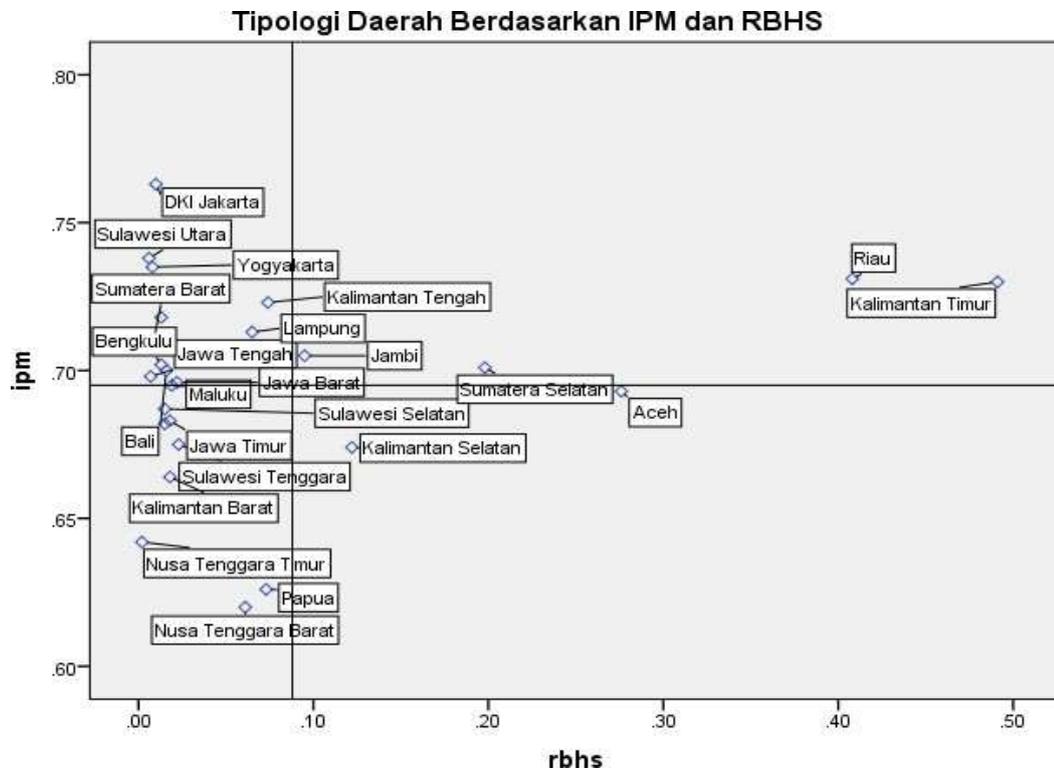


Sumber: BPS, 2016 (data diolah).

Grafik 3.1. Tipologi Daerah Berdasarkan IPM dan RPAD

Dari grafik 3.1. dapat dilihat bahwa provinsi yang tergolong IPM tinggi dan RPAD tinggi yaitu provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Provinsi yang tergolong IPM tinggi dan RPAD rendah yaitu provinsi Sulawesi Utara, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi,

Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Provinsi yang tergolong IPM rendah dan RPAD tinggi yaitu provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Provinsi yang tergolong IPM rendah dan RPAD rendah adalah provinsi Maluku, Aceh, Sulawesi Tengah, Sulawesi tenggara, Kalimantan Barat, NTT, Papua, NTB.



Sumber: BPS, 2016 (data diolah).

Grafik 3.2. Tipologi Daerah Berdasarkan IPM dan RBHS

Dari grafik 3.2. dapat dilihat bahwa provinsi yang tergolong IPM tinggi dan RBHS tinggi yaitu provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Provinsi yang tergolong IPM tinggi RBHS rendah yaitu provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Provinsi yang tergolong IPM rendah dan RBHS tinggi yaitu provinsi Aceh dan Kalimantan Selatan. Provinsi yang tergolong IPM rendah dan RBHS rendah adalah provinsi Maluku, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi tenggara, Kalimantan Barat, NTT, Papua, NTB.

Dari dua kategori di atas dapat disimpulkan bahwa provinsi yang tergolong IPM tinggi dan RPAD tinggi adalah provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. IPM tinggi dan RBHS tinggi adalah provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Tingginya RPAD, RBHS, dan IPM di provinsi tersebut sangat didukung oleh potensi dan fasilitas publik

yang dimiliki daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerahnya sehingga proses pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar tanpa bergantung dengan pemerintah pusat.

### Pemilihan Model Regresi Terbaik

#### 1. Pemilihan PLS dan FEM (Uji *Chow-test*)

Tabel 3.1. Hasil Uji *Chow-test*

Redundant Fixed Effects Tests  
Equation: Untitled  
Test cross-section fixedeffects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	27.837754	(25,358)	0.0000
Cross-section Chi-square	421.106969	25	0.0000

Sumber: BPS, 2016 (data diolah).

Berdasarkan pengujian yang dilakukan di atas maka model yang dipilih yaitu FEM karena nilai probabilitas f-stat signifikan, yaitu 0,00 dengan  $\alpha= 5$  persen.

#### 2. Pemilihan FEM dan REM (uji *Hausman-test*)

Tabel 3.2. Hasil Uji *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	13.973785	6	0.0299

Sumber: BPS, 2016 (data diolah).

Berdasarkan pengujian yang dilakukan di atas maka model yang dipilih yaitu FEM karena nilai probabilitas chi-square signifikan, yaitu 0,00 dengan  $\alpha= 5$  persen.

## Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Heterokedastisitas

Tabel 3.3. Hasil Regresi OLS

FEM dan GLS FEM Variabel dependen: IPM

Variabel independen	OLSFEM	GLSFEM
	Koefisien variabel	Koefisien variabel
C	0.605766***	0.611028***
RPAD	0.108996***	0.106699***
RBHS	0.022953	0.030742***
PDRBPK	0.031602	-0.026768
TKMSN	-0.133628***	-0.163127**
KGINI	0.208885***	0.209639***
TPGRN	-0.002649	-0.003323
R-squared	0.818070	0.832559
Adjusted R-squared	0.802316	0.818059
F-statistic	51.92857***	57.42133***
DW	1.305150	1.481703

Ket: \*\*signifikan  $\alpha=5\%$ , \*\*\*signifikan  $\alpha=1\%$

Sumber: BPS, 2016 (data diolah)..

Dari tabel 3.3.dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel independen pada metode GLS FEM meningkat dan nilai  $R^2$  meningkat jika dibandingkan dengan hasil OLS FEM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas dari model awal sehingga GLS FEM lebih baik digunakan.

### 2. UjiOutokorelasi

Menurut Gujarati (2010) permasalahan outokorelasi dapat diatasi dengan menggunakan metode GLS, walaupun nilai DW-stat nya  $< 1.5$  tetapi tidak menjadi masalah.Dalam penelitian ini menggunakan regresi GLS FEM *Cross-section weights* dengan *White cross-section*, artinya penelitian ini bebas dari masalah outokorelasi.

### 3. UjiMultikolinearitas

Tabel 3.4.*Correlation Matrix* Antar Variabel Independen Model 2

	RPAD	RBHS	PDRBPK	TKMSN	KGINI	TPGRN
RPAD	1.000000	-0.230238	0.171519	-0.438454	0.129350	-0.070715
RBHS	-0.230238	1.000000	0.200988	-0.059346	-0.140666	-0.013618
PDRBPK	0.171519	0.200988	1.000000	-0.421666	0.304093	0.022308
TKMSN	-0.438454	-0.059346	-0.421666	1.000000	-0.157643	-0.074804
KGINI	0.129350	-0.140666	0.304093	-0.157643	1.000000	0.059005
TPGRN	-0.070715	-0.013618	0.022308	-0.074804	0.059005	1.000000

Sumber: BPS, 2016 (data diolah)..

Dari tabel 3.4.dapat dilihat bahwa hubungan antar variabel independen tidak ada yang mencapai 0,8. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak terdapat masalah multikolinearitas.

### Uji *Robustness*

Uji *robustness* dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menambahkan proksi pada variabel independen. Variabel yang ditambah pada penelitian ini yaitu variabel rasio dana alokasi umum (RDAU).

Tabel 3.5. Hasil Regresi GLS FEM dan Uji *Robustness*

Variabel dependen:IPM		
Variabelindependen	GLSFEM	<i>UjiRobustness</i>
	Koefisien variabel	Koefisien variabel
C	0.611028***	0.617439***
RPAD	0.106699***	0.100915***
RBHS	0.030742***	0.021844***
RDAU		-0.011119
PDRBPK	-0.026768	-0.053804
TKMSN	-0.163127**	-0.158393**
KGINI	0.209639***	0.208582***
TPGRN	-0.003323	-0.002992
R-squared	0.832559	0.832914
Adjusted R-squared	0.818059	0.817937
F-statistic	57.42133***	55.61309***
DW	1.481703	1.444780

Ket: \*\*signifikan  $\alpha=5\%$ ,  
 \*\*\*signifikan  $\alpha=1\%$  Sumber:  
 BPS, 2016 (data diolah).

Dari tabel 3.5.dapat dilihat bahwa hasil regresi GLS FEM cenderung tidak jauh berbeda setelah di dilakukan penambahan variabel RDAU. Variabel RPAD, RBHS, KGINI masih berpengaruh signifikan pada  $\alpha= 1$  persen. Dengan demikian dapat disimpulkan hasil regresi GLS FEM pada penelitian ini relatif *robust* terhadap penambahan variabel independen.

### Hasil Dan Pembahasan

Hasil estimasi yang akan dibahas adalah hasil estimasi FEM dengan metode GLS, karena metode ini telah terbebas dari masalah outokorelasi dan heterokedastisitas, sehingga dapat memberikan hasil yang BLUE. Pembahasan mengenai hasil estimasi regresi dan uji hipotesis dijelaskan berdasarkan urutan hipotesis pada bab II.

Tabel 3.6. Hasil  
Regresi GLS FEM

Variabel dependen:IPM

Variabel independen	Koefisien variabel
C	0.611028***
RPAD	0.106699***
RBHS	0.030742***
PDRBPK	-0.026768
TKMSN	-0.163127**
KGINI	0.209639***
TPGRN	-0.003323
R-squared	0.832559
Adjusted R-squared	0.818059
F-statistic	57.42133***
DW	1.481703

Ket: \*\*signifikan  $\alpha=5\%$ ,

\*\*\*signifikan  $\alpha=1\%$  Sumber:

BPS, 2016 (data diolah).

### 1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mempunyai kegunaan sebagai ukuran ketepatan suatu garis regresi yang diterapkan terhadap suatu kelompok data hasil observasi (*a measure of the goodness of fit*). Dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) variabel RPAD, RBHS, PDRBPK, TKMSN, KGINI, dan TPGRN terhadap IPM adalah 0.832559. Artinya, variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sekitar 83 persen, sedangkan 17 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

### 2. Uji Parsial(t-stat)

Dari hasil regresi di atas secara parsial dapat dilihat bahwa ada empat variabel independen yang sesuai dengan hipotesis penelitian, yaitu RPAD, RBHS, TKMSN, dan TPGRN. RPAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, RBHS berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, TKMSN berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, TPGRN berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Sedangkan variabel independen yang tidak sesuai dengan hipotesis penelitian ada dua, yaitu PDRBPK dan KGINI. PDRBPK berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap IPM, KGINI berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

### 3. Uji Simultan(f-stat)

Uji simultan digunakan untuk menguji pengaruh signifikansi variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Secara simultan, variabel independen RPAD, RBHS, PDRBPK, TKMSN, KGINI, dan TPGRN berpengaruh

positif dan signifikan terhadap IPM yang ditunjukkan dengan probabilitas  $f\text{-stat} < \alpha = 5$  persen.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Dalam regresi dampak desentralisasi fiskal terhadap IPM provinsi-provinsi di Indonesia beserta beberapa variabel kontrol periode 2000-2014, dengan menggunakan metode GLS FEM, diperoleh nilai koefisien regresi untuk setiap variabel dalam penelitian dengan persamaan sebagai berikut :

$$\text{ipm}_{it} = 0.611028 + 0.106699\text{rpad}_{it} + 0.030742\text{rbhs}_{it} - 0.026768\text{pdrbpk}_{it} - 0.163127\text{tkmsn}_{it} + 0.209639\text{kgini}_{it} - 0.003323\text{tpgrn}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Interpretasi hasil regresi pengaruh RPAD, RBHS, PDRBPK, TKMSN, KGINI, TPGRN terhadap IPM provinsi-provinsi di Indonesia periode 2000–2014 adalah sebagai berikut:

#### **1. Pengaruh RPAD Terhadap IPM**

Hasil dari regresi RPAD terhadap IPM menunjukkan pengaruh yang positif, yaitu sebesar 0.106699. Artinya setiap ada peningkatan RPAD 1 persen maka akan meningkatkan IPM sebesar 0.106699 persen, dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Neoklasik, Bird dan Vaillancourt (1998), dan penelitian Jumadi *et.al* (2013) yang menjelaskan adanya pengaruh positif RPAD terhadap IPM.

#### **2. Pengaruh RBHS Terhadap IPM**

Hasil dari regresi RBHS terhadap IPM menunjukkan pengaruh yang positif, yaitu sebesar 0.030742. Artinya setiap ada peningkatan RBHS 1 persen maka akan meningkatkan IPM sebesar 0.030742 persen, dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Adam Smith dan penelitian Jumadi *et.al* (2013) yang menjelaskan adanya pengaruh positif RBHS terhadap IPM.

#### **3. Pengaruh PDRBPK Terhadap IPM**

Hasil dari regresi PDRBPK terhadap IPM menunjukkan pengaruh yang negatif yaitu sebesar - 0.026768. Artinya setiap ada peningkatan PDRBPK 1 persen maka akan menurunkan IPM sebesar 0.026768 persen, dan sebaliknya. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Oates Dan hasil penelitian Suri *et.al.*(2010) yang menjelaskan adanya pengaruh positif PDRBPK terhadap IPM.

#### **4. Pengaruh TKMSN Terhadap IPM**

Hasil dari regresi pengaruh TKMSN terhadap IPM menunjukkan pengaruh yang negatif, yaitu sebesar -0.163127. Artinya setiap ada peningkatan TKMSN 1 persen akan menurunkan IPM sebesar 0.163127 persen, dan sebaliknya. Hasil penelitian ini

sesuai dengan teori Pigou (1990) Dan hasil penelitian Suri *et.al.*(2010) menyatakan bahwa ada pengaruh negatif kemiskinan terhadap IPM.

#### 5. Pengaruh KGINI Terhadap IPM

Hasil dari regresi menunjukkan bahwa ada pengaruh positif KGINI terhadap IPM, yaitu sebesar 0.209639. Artinya setiap KGINI meningkat 1 persen maka IPM akan meningkat sebesar 0.209639 persen, dan sebaliknya. Hasil regresi ini tidak sesuai dengan teori Pigou (1960) dan hasil penelitian Suri *et.al.*(2010) menyatakan ada pengaruh negatif KGINI terhadap IPM.

#### 6. Pengaruh TPGRN Terhadap IPM

Hasil dari regresi pengaruh TPGRN terhadap IPM menunjukkan pengaruh yang negatif, yaitu sebesar -0.003323. Artinya setiap ada peningkatan TPGRN 1 persen akan menurunkan IPM sebesar 0.003323 persen, dan sebaliknya. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Neoklasik dan penelitian Parhah (2002) menyatakan bahwa ada pengaruh negatif pengangguran terhadap IPM.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil dan pembahasan mengenai tipologi daerah dan dampak desentralisasi fiskal terhadap IPM di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil dari analisis *scatter graph* menunjukkan bahwa provinsi yang tergolong IPM tinggi dan rasio PAD tinggi adalah provinsi DKI Jakarta, Yogyakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. IPM tinggi dan rasio DBH SDA tinggi adalah provinsi Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi.
2. Hasil dari regresi dampak desentralisasi fiskal terhadap IPM dilihat dari sisi rasio PAD menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan sesuai dengan teori Neoklasik, Bird dan Vaillancourt (1998) dan penelitian Jumadi *et.al* (2013). Dari sisi rasio DBH SDA juga menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan sesuai dengan teori Adam Smith, dan penelitian Jumadi *et.al* (2013). Hasil regresi ini relatif *robust* karena cenderung tidak jauh berbeda setelah ditambah variabel rasio DAU.

### **Saran**

Dari hasil penelitian ini maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk provinsi yang tergolong IPM rendah, rasio PAD rendah, dan rasio DBH SDA rendah diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah masing-masing

- agar semua variabel tersebut dapat ditingkatkan.
2. Untuk pemerintah provinsi diharapkan dapat menentukan kebijakan untuk meningkatkan PAD karena PAD tersebut sangat berpengaruh terhadap IPM provinsi-provinsi di Indonesia.
  3. Untuk penelitian lebih lanjut dapat memodifikasi penelitian ini dengan memperpanjang tahun analisis, menambah variabel baru, dan menggunakan alat analisis lain (seperti; spss dan stata) agar dapat memberikan hasil yang lebihbaik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2007, *Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2007*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.
- Barro, R.J., 1990, "Government spending in a simple model of endogenous growth", *Jurnal of Political Economy*, Vol 98, Hal 103-25.
- Bird, R.M., 1993, "Threading The Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization", *Nasional Tax Journal*, Vol 46, Hal 201-27.
- Bird, R.M., dan Vaillancourt, F., 1998, *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, Cambridge University Press, New York.
- BPS, 2016, *Indonesia Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Cheema, G.S. dan Rodinelli, D.A., 1983, "Planning Theory", *Working Paper 581*, The World Bank.
- Gujarati, D.N., 2010, *Basic Econometrics*, The McGraw-Hill Companies, New York.
- Jumadi, Pudjiharjo, M., Maski, G., dan Khusaini, M., 2013, The Impact of Fiscal Decentralization on Local Economic Development in East Java, *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, Vol 13, Hal 01-07.
- Kemenkeu, 2013, *Deskripsi dan Analisis APBD 2013*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta.
- Oates, W.E., 1993, "Fiscal Decentralization and Economic Development", *National Tax Journal*, Vol 3, Hal 237-43.
- Pigou, A.C., 1960, *The Economics of Welfare*, Macmillian, United State America.
- RPJMN 2004-2009, 2006, Sinar Grafika, Jakarta.
- Smith, B.C., 1986, "Decentralization: The Territorial Dimension of The State", *Journal of Political Science*, Vol 38, Hal 194-96.
- Suri, T., Boozer, M.A., Ranis, G., dan Stewart, F., 2011, "Paths to Success: The Relationship Between Human Development and Economic Growth", *World Development*, Vol 39, Hal 506-22.
- UNDP, 1990, *Human Development Report*, Oxford University Press, New York. UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004, Cemerlang, Jakarta.

